

## **EVALUASI PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3)**

### ***EVALUATION OF IMPLEMENTATION OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) BASED ON MANAGEMENT SYSTEM (OHS-MS)***

Oleh: Karunia Ratna Istiqlal, Ketut Ima Ismara  
Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta  
Karunia.ratna@gmail.com, imai@uny.ac.id

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan: (1) penerapan K3 berdasarkan sistem manajemen, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem manajemen K3 di bengkel Elektro dan Informatika Balai latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi dengan model evaluasi *Countenance Stake* yaitu *antecedents, transaction, dan output*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Antecedents* : Tahapan penetapan kebijakan dan perencanaan K3 mendapatkan kategori sesuai menurut SMK3. Tahapan pelaksanaan K3 mendapatkan kategori sesuai menurut SMK3. *Transaction*: Tahap perencanaan K3 mendapatkan kategori sesuai menurut SMK3. Tahapan pelaksanaan K3 mendapatkan kategori kurang sesuai menurut SMK3. *Output*: Tahapan pemantauan dan evaluasi K3 mendapatkan kategori kurang sesuai menurut SMK3. Tahapan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 mendapat kategori kurang sesuai menurut SMK3. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan K3 yaitu faktor pendukung adalah dokumentasi; P3K; lingkungan kerja yang sesuai; tujuan dan program terlaksana; dan faktor penghambat adalah komitmen dan pengawasan K3 serta tidak berjalannya organisasi/badan khusus yang memiliki tanggung jawab dalam penerapan K3.

Kata kunci: evaluasi, kesehatan dan keselamatan kerja, SMK3

#### **Abstract**

*The purposes of this study are to determine: (1) the implementation of OHS management system, (2) factors affecting the implementation of OHS management system in the workshop of Electric and Informatics Yogyakarta. This study is an evaluation research with the Countenance Stake model consisting of antecedents, transactions, and output. The results of the study show that: (1) antecedents: the implementation OHS in stages of policy making and planning was categorized as appropriate. The implementation OHS in stages of execution was categorized as appropriate; transaction: the implementation OHS in stages of planning was categorized as appropriate. The implementation OHS in stages of execution was categorized as less appropriate; output: the implementation OHS in stages of monitoring and evaluation was categorized as less appropriate. The implementation OHS in stages of review and improvement was categorized as less appropriate. (2) Factors affecting the implementation of OHS divided in to two: (a) supporting factors which are documentation, first aid, a suitable work environment, goals and programs implemented; (b) preventing factors which are no commitment and supervision of OHS implementation and inactive division responsible for the implementation of OHS.*

*Keywords: Evaluation, Occupational Health and Safety, OHS-MS*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai sumber daya yang penting bagi pembangunan. Era globalisasi dan pasar bebas yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota. Hal ini dituangkan dalam visi pembangunan kesehatan dengan motto 'Indonesia Sehat "2010"' yang mempunyai misi yaitu : menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2003:4).

ILO (*International Labour Organization*), sebagai salah satu badan PBB yang fokus pada masalah Pekerja di seluruh dunia, menyebutkan 6 fakta seputar K3 yang harus sama sama kita perhatikan. 1. ILO memperkirakan bahwa tiap tahun sekitar 24 juta orang meninggal karena kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja termasuk didalamnya 360.000 kecelakaan fatal dan diperkirakan 1,95 juta disebabkan oleh penyakit fatal yang timbul di lingkungan kerja. 2. Hal tersebut berarti bahwa pada akhir tahun hampir 1 juta pekerja akan mengalami kecelakaan kerja dan sekitar 5.500 pekerja meninggal akibat kecelakaan atau penyakit di lingkungan kerja 3. Menurut sudut pandang ekonomi, 4% atau senilai USD 1,25 Trilyun dari *Global Gross Domestic Product* (GDP) dialokasikan untuk biaya dari kehilangan waktu kerja akibat kecelakaan dan penyakit di lingkungan kerja, kompensasi untuk para pekerja, terhentinya produksi, dan biaya biaya pengobatan pekerja. 4. Menurut M. Hanif, kecelakaan kerja di Indonesia data dari BPJS Ketenagakerjaan akhir tahun 2015 menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja

sejumlah 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.375 orang. Angka di atas masih termasuk angka kecelakaan tinggi. Di Yogyakarta, menurut Rina Eviana kasus kecelakaan kerja di Yogyakarta masih relatif tinggi, sepanjang tahun 2013. Data pemerintah kota (pemkot) Yogyakarta pada tahun 2013 terjadi kecelakaan sebesar 1347, 651 kasus merupakan kecelakaan dalam lokasi kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk untuk melakukan pencegahan meningkatnya angka kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak tersebut melalui pendidikan dan latihan kepada calon tenaga kerja. Pemerintah sendiri ikut andil dalam menerapkan usaha-usaha pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Usaha penerapan pedoman kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia salah satunya didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah ini mengandung 22 pasal dan terdiri dari 3 bab. PP No. 50 ini membahas tentang tujuan, penerapan, penetapan kebijakan SMK3, Perencanaan SMK3, pelaksanaan rencana SMK3, pemantauan evaluasi SMK3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, serta penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi dampak kecelakaan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan sebagai sarana untuk membentuk kualitas sumber daya semakin meningkat. Lembaga pendidikan seperti sekolah kejuruan dan balai latihan merupakan tempat yang cocok untuk menerapkan pemahaman dasar tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga pekerja lulusan SMK. Siswa SMK adalah salah satu sasaran utama terhadap pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana tujuan pendidikan kejuruan

merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Hal tersebut menunjukkan peserta didik balai latihan pendidikan teknik akan selalu berhubungan langsung dengan masalah keselamatan kerja baik di bengkel praktik maupun di industri kerjanya nanti, sehingga dalam kegiatan praktik di bengkel, peserta didik dibudayakan untuk menerapkan pedoman K3.

Berdasarkan kenyataan yang diperoleh, maka perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bengkel Elektro dan Informatika di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta. Evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja apakah sudah tercapai sesuai dengan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Evaluasi. Evaluasi adalah "riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilai dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2012). Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi *Countenance Stake*.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta beralamat di jalan Kyai Mojo No.70 Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan November - Desember 2016.

### **Subjek dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini yang menjadi subjek adalah instruktur jurusan Elektro dan Informatika di BLPT Yogyakarta berjumlah 10 orang. Selain itu peserta diklat jurusan Elektro dan Informatika

BLPT selama bulan November hingga Desember 2016 berjumlah 45 orang.

### **Prosedur Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model evaluasi *Countenance Stake*. Menurut Suharsimi dan Cepi (2014) Penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu *antecedents* (masukan), *transaction* (proses), *output* (keluaran). Terdapat 5 indikator yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, pemantauan dan evaluasi K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja K3.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner, observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode kuesioner menggunakan skala penilaian Likert dengan interval antara 1 sampai dengan 4. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui indikator penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, pemantauan dan evaluasi K3. Kuesioner dibagikan kepada 10 orang instruktur dan 45 orang peserta diklat jurusan Elektro dan Informatika BLPT.

Metode observasi dengan cara pengamatan peneliti saja tanpa mengikuti kegiatan yang dilakukan di bengkel jurusan Elektro dan Informatika BLPT. Metode wawancara dilakukan digunakan untuk menanyakan tahapan peninjauan dan peningkatan kinerja. Adapun pertanyaan ini diajukan kepada kepala seksi Elektro dan Informatika berupa audit internal K3 yang dilaksanakan di BLPT.

Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dan analisis statik deskriptif. Teknik analisis interaktif mengadopsi dari model analisis interaktif Miles and Huberman dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data,

menyimpulkan data (Suharsimi dan Cepi, 2014). Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014:29). Penelitian ini melalui perhitungan gejala pusat (*Central Tendency*) dan variabel yakni mean atau rerata (M), median (Me atau nilai tengah dan Modus (Mo) serta Standar Deviasi (SD). Perhitungan penelitian ini menggunakan *Microsoft Excell*

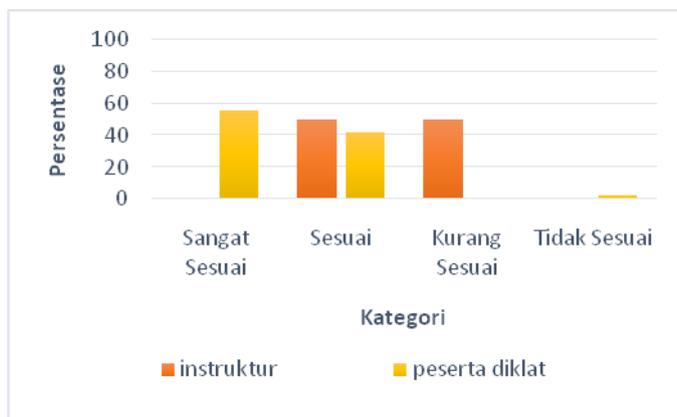
## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini ditunjukkan dalam 3 tahapan sebagai berikut:

### A. Antecedents

#### 1. Penetapan kebijakan dan perencanaan K3

Data kuantitatif yang diperoleh dijabarkan dalam Gambar 1.



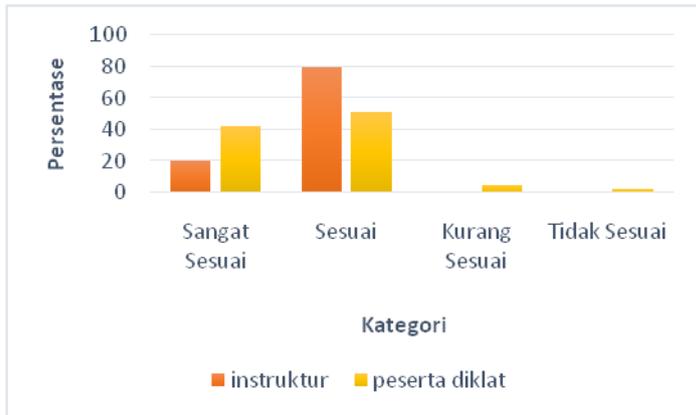
Gambar 1. Indikator Penetapan Kebijakan dan Perencanaan K3

Tahapan penerapan kebijakan dan perencanaan K3 berdasarkan data kuesioner yang didapatkan, untuk responden instruktur mengkategorikan tahapan penetapan kebijakan dan perencanaan K3 sesuai dengan nilai rata-rata 31,3 dan untuk responden siswa mengkategorikan sangat sesuai dengan nilai rata-rata 29,49. Data kuesioner antara responden instruktur dan peserta diklat menunjukkan perbedaan mencolok. Data yang diperoleh ini menunjukkan bahwa undang-undang yang berlaku serta komitmen dan

kepemimpinan yang dilaksanakan sudah sesuai, karena dari kepala BLPT sudah mendorong warga BLPT untuk menerapkan K3. Kebijakan kebijakan yang ada sudah dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi dari BLPT. Adanya komitmen ini diwujudkan dengan adanya struktur organisasi, papan pengumuman K3, surat kebijakan K3, serta pembuatan anggaran untuk melaksanakan K3. Berdasarkan hasil observasi, surat kebijakan dan undang-undang yang digunakan sudah tercantum dalam surat kebijakan K3 BLPT, pemasangan stuktur organisasi sudah terlaksana, papan pengumuman K3 sudah dilaksanakan namun belum maksimal, anggaran dana K3 terlaksana dengan rincian dana untuk K3 terintegrasi dengan anggaran dana kegiatan yang dilakukan di BLPT. Berdasarkan hasil pengamatan, tahapan penetapan kebijakan dan perencanaan K3 terlaksana dengan kategori sesuai SMK3 menurut PP No. 50 tahun 2012 pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Kategori sesuai diberikan dari hasil kuesioner, observasi, dan dokumentasi yang menyatakan tahapan penetapan kebijakan dan perencanaan K3 sesuai menurut SMK3 PP No.50 tahun 2012. Tahapan penetapan kebijakan dan perencanaan K3 dapat ditingkatkan dengan cara sebaiknya pihak BLPT melakukan pengawasan langsung dari kepala mengenai komitmen instruktur dan warga BLPT terkait penerapan K3. Kepala BLPT dapat memaksimalkan kerja dari organisasi K3 yang sudah dibentuk. Organisasi K3 dapat melakukan pengawasan secara berkala, dan dapat melakukan pelatihan K3 kepada instruktur maupun peserta diklat. Organisasi K3 ini mampu menanamkan komitmen K3 sesuai visi dan misi dari BLPT. Organisasi K3 dapat memberikan pelatihan K3 kepada instruktur, sehingga instruktur memiliki ketrampilan dalam pelaksanaan K3. Pelatihan K3 dibutuhkan agar instruktur memberikan tindakan dan kebiasaan baik kepada peserta diklat, sehingga terciptanya pelaksanaan K3 yang sesuai sasaran.

#### 2. Pelaksanaan K3

Data kuantitatif yang diperoleh dijabarkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Indikator Pelaksanaan K3

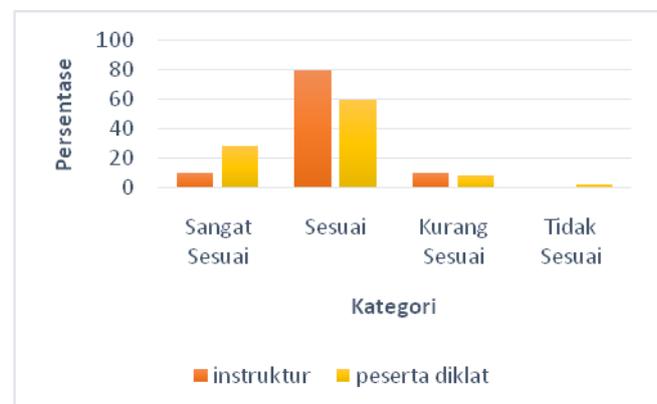
Tahap pelaksanaan K3, berdasarkan data yang diperoleh tahapan pelaksanaan K3 mendapat kategori sesuai pada responden instruktur dengan nilai rata-rata 42,4 dan untuk responden peserta diklat mengkategorikan tahapan pelaksanaan K3 sesuai dengan nilai rata-rata 44,8. Terdapat perbedaan hasil responden instruktur dan peserta diklat. Berdasarkan hasil penelitian observasi dan dokumentasi, sub indikator dokumentasi berupa peraturan K3, pedoman K3, poster K3 sudah dilaksanakan. Peraturan K3 dan pedoman K3 tertulis dalam kebijakan K3 yang dilaksanakan di BLPT. Poster K3 di letakkan pada setiap bengkel, masing masing bengkel memiliki 1 poster K3. Sub indikator P3K seperti peralatan P3K sudah tersedia di setiap masing-masing seksi jurusan, sedangkan untuk pelatihan dan sertifikat untuk tim P3K masih belum tersedia. Lingkungan kerja bengkel sudah sesuai, dan tujuan dan program yang dijalankan sudah sesuai dengan kebijakan K3. Berdasarkan data yang didapatkan dapat disimpulkan tahapan pelaksanaan K3 sudah terlaksana dan dikategorikan sesuai menurut data kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Guna meningkatkan kinerja yang sudah ada, sebaiknya adanya pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan menerapkan 5S dan *ergonomic check point*. Menurut Takasbi Osada (2004) 5S adalah *Seiri* (pemilahan), *Seiton* (penataan), *Seiso* (pembersihan), *Seiketsu* (pemantapan), dan *Shitsuke* (pembiasaan). Langkah *Seiri* atau pemilahan dilakukan dengan Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Vol.7, No.2, April 2017 : 152-160

cara memilih sesuatu yang diperlukan, atau sesuai dengan prinsip dan aturan yang ada. Pemilihan baik dilakukan dengan manajemen stratifikasi, dengan membagi secara kelompok keperluan. *Seiton* atau penataan, dapat melakukan perencanaan fungsional, setelah melakukan statifikasi pada proses pemilihan, setelah itu didapatkan barang-barang sesuai dengan keperluannya, sehingga proses penataan lebih mudah, dan mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian barang. *Seiso* atau pembersihan, pembersihan dilakukan untuk membuang kotoran atau debu yang ada. Pembersihan ini dapat memelihara peralatan dan bengkel dengan baik. *Seiketsu* atau pemantapan, menurut Takasbi Osada (2004) pemantapan mencakup kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan. Terakhir, *Shitsuke* atau pembiasaan, ini merupakan perilaku untuk membiasakan langkah langkah 5S seperti yang sudah dijabarkan. Pembiasaan ini untuk menciptakan tempat kerja dengan kebiasaan dan perilaku yang baik. *Ergonomic check point* berisi aturan atau cara mengenai lingkungan kerja, penggunaan APD, identifikasi bahaya, cara penggunaan alat, penempatan alat dan lain-lain.

## B. Transactions

### 1. Perencanaan K3

Data kuantitatif yang diperoleh dijabarkan dalam Gambar 3.



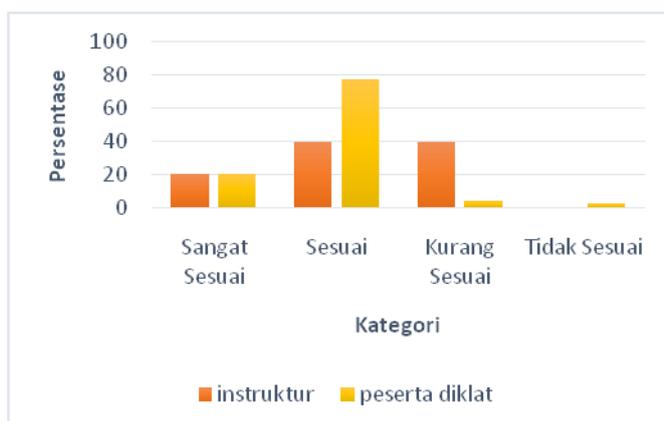
Gambar 3. Indikator Perencanaan K3

Tahap pelaksanaan K3, berdasarkan data yang diperoleh tahapan pelaksanaan K3 mendapat kategori sesuai pada responden instruktur dengan

nilai rata-rata 45,5 dan responden peserta diklat mengkategorikan tahapan pelaksanaan K3 sesuai dengan nilai rata-rata 48,04. Terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil responden instruktur dan peserta diklat. Berdasarkan hasil data kualitatif berupa observasi dan dokumentasi, tahapan ini belum terlaksana sepenuhnya seperti surat prosedur pelatihan K3 yang belum terlaksana. Surat tugas penanggung jawab K3 dan surat penunjukan instruktur belum terlaksana. Pengawasan SOP terhadap peserta diklat masih kurang. Dokumen pelaporan masih belum dilaksanakan. Menurut PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK pasal 10, pasal 11, dan pasal 13, tahapan pelaksanaan K3 kurang sesuai, karena berdasarkan pertimbangan pada data kualitatif yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, untuk mengatasi permasalahan di atas sebaiknya pihak BLPT memberikan pelatihan kepada instruktur dan memberikan saksi yang jelas kepada instruktur untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan SOP yang ada. Pelatihan K3 penting untuk dilaksanakan agar instruktur mengetahui penerapan K3 yang sesuai, serta instruktur sendiri memiliki kualifikasi dibidang K3. Kualifikasi ini menjadi nilai tambahan bagi instruktur sendiri. Selain itu, perlu adanya dokumentasi surat-surat tugas dan penunjukan jabatan, agar garis koordinasi yang ada dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku.

## 2. Pelaksanaan K3

Data kuantitatif yang diperoleh dijabarkan dalam Gambar 4



Gambar 4. Indikator Pelaksanaan K3

Tahap pelaksanaan K3, berdasarkan data yang diperoleh tahapan pelaksanaan K3 mendapat kategori sesuai pada responden instruktur dengan nilai rata-rata 45,5 dan responden peserta diklat mengkategorikan tahapan pelaksanaan K3 sesuai dengan nilai rata-rata 48,04. Terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil responden instruktur dan peserta diklat. Berdasarkan hasil data kualitatif berupa observasi dan dokumentasi, tahapan ini belum terlaksana sepenuhnya seperti surat prosedur pelatihan K3 yang belum terlaksana. Surat tugas penanggung jawab K3 dan surat penunjukan instruktur belum terlaksana. Pengawasan SOP terhadap peserta diklat masih kurang. Dokumen pelaporan masih belum dilaksanakan. Menurut PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK pasal 10, pasal 11, dan pasal 13, tahapan pelaksanaan K3 kurang sesuai, karena berdasarkan pertimbangan pada data kualitatif yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, untuk mengatasi permasalahan di atas sebaiknya pihak BLPT memberikan pelatihan kepada instruktur dan memberikan saksi yang jelas kepada instruktur untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan SOP yang ada. Pelatihan K3 penting untuk dilaksanakan agar instruktur mengetahui penerapan K3 yang sesuai, serta instruktur sendiri memiliki kualifikasi dibidang K3. Kualifikasi ini menjadi nilai tambahan bagi instruktur sendiri. Selain itu, perlu adanya dokumentasi surat-surat tugas dan penunjukan jabatan, agar garis koordinasi yang ada dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku.

## C. Output

### 1. Pemantauan dan Evaluasi K3

Data kuantitatif yang diperoleh dijabarkan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Indikator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Tahap pemantauan dan evaluasi kinerja K3, berdasarkan data yang diperoleh tahapan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 mendapat kategori kurang sesuai pada responden instruktur dengan nilai rata-rata 34,7 dan untuk responden peserta diklat mengkategorikan tahapan pelaksanaan K3 sesuai dengan nilai rata-rata 15,33. Terdapat perbedaan data yang didapatkan dari responden instruktur dan peserta diklat. Data kualitatif yang didapatkan, seluruh sub indikator yang ada sudah terlaksana akan tetapi belum didokumentasikan. Pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, sudah adanya pelaporan tetapi belum adanya pendataan setiap pelaporan, pemeliharaan sarana dan prasarana sudah dilaksanakan, akan tetapi data inventaris yang ada belum disimpan dengan baik, pemantauan kesehatan belum terlaksana, serta evaluasi yang dilaksanakan masih secara informal, dan hanya dibahas pada rapat tahunan dan belum terdokumentasikan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sub indikator berupa pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja, pemeliharaan dan perbaikan sarana, pemantauan kesehatan, serta evaluasi kebijakan menurut PP No. 50 tahun 2012, pasal 14 masih belum terlaksana dengan baik dan dapat dikategorikan kurang sesuai. Mengatasi permasalahan yang adadapat dilakukan dengan cara sebaiknya pihak BLPT mendokumentasikan seluruh kegiatan dengan baik, dan adanya pengawasan setiap kegiatan sehingga pemantauan dan evaluasi K3 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Pemantauan ini dapat dilakukan

dengan melakukan pencatatan setiap kegiatan yang terjadi dibengel, seperti pencatatan kecelakaan kerja, inventarisasi barang. Serta dilakukan evaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga evaluasi ini nantinya akan mempermudah dalam melakukan audit K3. Evaluasi ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan panduan dalam SMK3 yaitu menerapkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang evaluasi dan audit internal.

## 2. Tahap peninjauan dan peningkatan kinerja K3

Tahap peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di bahas dapam PP No. 50 tahun 2012 pada pasal 14 dan 15. Di BLPT, tahapan ini sudah dilakukan seperti adanya pembahasan audit internal K3 bersama kepala BLPT serta kepala seksi setiap jurusan. Pembahasan ini berlangsung setiap rapat akhir tahun bersamaan dengan rapat tahunan yang diselenggarakan. Akan tetapi pemahasan yang ada masih sebatas pembahasan kegiatan umum yang dilaksanakan di BLPT. Peninjauan dan peningkatan kerja masih sebatas secara lisan karena belum terdokumentasikan menjadi dokumen K3. Tahapan ini belum terlaksana dengan baik, sehingga dapat dikategorikan kurang sesuai dengan SMK3. Tahapan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 dapat diatasi sebaiknya pihak BLPT melakukan rapat khusus terkait audit internal K3 dan mendokumentasikan setiap peningkatan yang telah dicapai. Peninjauan sendiri di gunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dari audit K3 yang telah dilaksanakan. Perbaikan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan K3, terjadinya perubahan struktur organisasi, baik dalam lingkup BLPT maupun organisasi K3, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya hasil kajian terkait kecelakaan kerja, dan adanya pelaporan serta masukan dari pengguna bengkel, seperti instruktur dan peserta diklat.

## D. Faktor faktor Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat dua faktor yang memengaruhi proses penerapan K3 di bengkel elektro dan informatika BLPT. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2 yaitu faktor pendukung serta faktor penghambat. Faktor pendukung dalam penerapan K3 berdasarkan sistem manajemen K3 adalah dokumentasi, P3K, lingkungan kerja yang sesuai, tujuan dan program terlaksana. Faktor pendukung sendiri terdiri dari sarana dan prasarana yang telah tersedia di bengkel. Dari sarana yang dicapai terdapat lingkungan yang memadai, seperti ruangan bengkel yang nyaman digunakan, tersedianya MCK serta air bersih disekitar bengkel, penempatan peralatan yang tertata rapi, APD yang disediakan serta peralatan yang memadai praktik sehingga peserta diklat dan instruktur pengguna bengkel nyaman. Disamping itu terdapat poster guna mengingatkan pengguna bengkel untuk mentaati K3 yang berlaku. Di bengkel dan sekitar bengkel elektro dan informatika terpampang rambu-rambu bahaya serta peringatan, yang memudahkan pengguna seperti peserta diklat dan instruktur mengantisipasi bahaya yang akan terjadi.

Faktor penghambat sendiri berasal dari sumber daya manusia yang ada. Hal ini terjadi karena komitmen yang kurang ditekankan kepada instruktur dan peserta diklat. Akibatnya sumber daya yang ada masih dinilai kurang layak. Adapun ketika praktik, instruktur masih lengah ketika mengingatkan peserta diklat menggunakan APD seperti baju praktik (wearpack), topi kerja, dan sarung tangan. Komitmen dan kebijakan K3 yang kurang terlaksanakan karena kurang terjalannya kerja sama antara pimpinan, instruktur, peserta diklat dan pihak lainnya yang saling berkaitan. Organisasi yang mengurus K3 masih belum aktif bekerja, sehingga wewenang, tanggung jawab serta kewajiban dalam melaksanakan keselamatan kerja masih dipegang masing-masing instruktur, petugas bengkel serta kepala seksi Elektro dan Informatika.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan K3 di bengkel elektro dan informatika BLPT menggunakan model evaluasi *Countenance Stake* dijabarkan sebagai berikut: (a) *Antecedents*: (1) Tahapan penetapan kebijakan dan perencanaan K3 sudah terlaksana dan mendapatkan kategori sesuai menurut SMK3 (2) Tahapan pelaksanaan K3 sudah terlaksana dan mendapatkan kategori sesuai menurut SMK3. (b) *Transaction*: (1) Tahap perencanaan K3 sudah terlaksana dan mendapatkan kategori sesuai menurut SMK3. (2) Tahapan pelaksanaan K3 masih belum terlaksana dengan baik mendapatkan kategori kurang sesuai menurut SMK3. (c) *Output*: (1) Tahapan pemantauan dan evaluasi K3 masih belum terlaksana dengan baik dan mendapatkan kategori kurang sesuai menurut SMK3. (2) Tahapan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 masih belum terlaksana dengan baik, sehingga dapat dikategorikan kurang sesuai menurut SMK3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan K3 di bengkel elektro dan informatika BLPT: (a) Faktor pendukung penerapan K3 di bengkel elektro dan informatika BLPT adalah dokumentasi, P3K, lingkungan kerja yang sesuai, tujuan dan program terlaksana. (b) Faktor penghambat penerapan K3 di bengkel elektro dan informatika BLPT adalah komitmen dan pengawasan K3 serta masih belum berjalannya organisasi/ badan khusus yang memiliki tanggung jawab dalam penerapan K3.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang didapatkan maka peneliti memiliki saran yang dapat diterapkan berbagai pihak antara lain sebagai berikut: (1) Pihak BLPT melakukan pengawasan langsung dari kepala mengenai komitmen instruktur dan warga BLPT terkait penerapan K3.

(2) Pihak BLPT melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana bengkel maupun lingkungan BLPT. (3) Pihak BLPT mensosialisasikan identifikasi bahaya setiap alat praktik dan bengkel kepada peserta diklat dan instruktur. Sosialisasi dapat berupa poster, himbauan ataupun informasi kepada instruktur, peserta diklat dan pengguna bengkel. (4) Pihak BLPT memberikan pelatihan kepada instruktur dan memberikan saksi yang jelas kepada instruktur untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan SOP yang ada. (5) Pihak BLPT melakukan dokumentasi surat-surat tugas dan penunjukan jabatan, agar garis koordinasi yang ada dapat berjalan dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku. (6) Pihak BLPT melakukan rapat khusus terkait audit internal K3 dan mendokumentasikan setiap peningkatan yang telah dicapai pihak BLPT melakukan rapat khusus terkait audit internal K3 dan mendokumentasikan setiap peningkatan yang telah dicapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan. (2003). *Pedoman Indikator Indonesia Sehat*. Jakarta: Departemen Kesehatan
- International Labour Organization. (2010). *Ergonomic Checkpoints : Practical and easy-to-implement solution for improving safety, health, and working condition*. Geneva: ILO Cataloguing in Publication Data
- Kementrian Sekretariat Negara. 2012. *PP RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Kemensesneg
- Osada, Takasbi. (2002). *Sikap Kerja 5S*. Jakarta: PPM.
- Muh. Hanif. (2016). *Berita/Kecelakaan kerja di Indonesia*. Diakses pada [www.poskotanews.com](http://www.poskotanews.com) tanggal 3 Oktober 2016.

- Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rina Eviana. (2014). *Berita/Kasus kecelakaan di Yogyakarta*. Diakses pada [www.tribunjogja.com](http://www.tribunjogja.com) tanggal 8 Februari 2017.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.